

## ABSTRAK

### Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Dari Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara

Oleh : Yuliana Indah Safitri

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum

Dosen Pembimbing Pendamping : Arif Santoso, S.H., M.Si.

Pemenang lelang hanya mendapatkan risalah lelang yang menyatakan sebagai akta jual beli. Tidak diberikan atau diterbitkan STNK atau BPKB sebagaimana kita beli barang baru di dealer motor. Didalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dijelaskan bahwa “setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi tersebut meliputi Registrasi Kendaraan Bermotor baru, Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Permasalahan yaitu Bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara dan Tujuan Penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara serta Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenang lelang dari barang bukti yang disita oleh negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis tentang penyimpangan penyaluran dana Bansos ini dibahas dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) agar dapat diketahui duduk persoalan yang sesungguhnya dan dikemukakan pendapat dalam bentuk saran tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait.

Kepastian hukum pemenang lelang di muka umum terdapat dalam Peraturan Lelang, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Selain itu penjualan barang yang disita di muka umum dilakukan dengan ‘perantara’ atau ‘bantuan’ Kantor Lelang Negara. Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik maka akan mendapatkan kepastian hak pembeli lelang pasti dan dijamin oleh hukum, dimana sebelum pelaksanaan lelang, telah disampaikan bahwa kendaraan yang akan dilelang tidak dilengkapi dengan BPKB.

Diharapkan dalam pelaksanaan lelang Terhadap Pemenang Lelang Dari Barang Bukti Yang Disita Oleh Negara harus didasarkan kepada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum lelang serta Hendaknya pemenang lelang dalam memperoleh objek lelang yang telah dibelinya dari badan lelang meminta dokumen-dokumen yang lengkap sebagai dasar hukum diperolehnya objek lelang tersebut dari badan lelang.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Pemenang Lelang, Barang Bukti.

## **ABSTRACT**

### **Legal Protection Against Auction Winners From Evidence Confiscated by the State**

*By : Yuliana Indah Safitri*

*Main Advisor : Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum*

*Supervising Lecturer : Arif Santoso, S.H., M.Si.*

*The auction winner only gets the minutes of the auction which states it is a deed of sale and purchase. Not given or issued STNK or BPKB as we buy new goods at a motorcycle dealer. In Article 64 paragraph (1) and paragraph (2) of the Traffic Law it is explained that "every Motorized Vehicle must be registered. The registration includes registration of new motorized vehicles, registration of changes in the identity of motor vehicles and owners, registration of renewal of motor vehicles; and/or registration of ratification of Motorized Vehicles,*

*With problems namely how is legal certainty to the winner of the auction from the evidence confiscated by the state and how is the legal protection for the winner of the auction from the evidence confiscated by the state and The purpose of writing in this thesis research is to find out and analyze the legal certainty of the auction winner from the evidence confiscated by the state and to find out and analyze the legal protection of the auction winner from the evidence confiscated by the state.*

*This study uses a normative juridical research method with an analysis of deviations in the distribution of social assistance funds. This study is discussed with a statutory approach and a case approach so that the real problems can be identified and opinions are expressed in the form of suggestions for actions that can be taken by the community. related parties.*

*The legal certainty of the winner of the auction in public is contained in the Auction Rules, concerning Auction Implementation Guidelines. In addition, the sale of confiscated goods in public is carried out with the 'intermediary' or 'assistance' of the State Auction Office. Legal protection for auction buyers who have good intentions will get the certainty of the rights of the auction buyers for sure and guaranteed by law, where prior to the auction, it has been submitted that the vehicle to be auctioned is not equipped with BPKB.*

*It is hoped that the auction winner of the auction winner from the evidence confiscated by the state must be based on the applicable legal procedures and provisions in the field of auction law and the auction winner in obtaining the auction object that has been purchased from the auction body requires complete documents as a legal basis. the object of the auction is obtained from the auction agency.*

**Keywords:** *Legal Protection, Auction, Evidence.*